

The background image shows the Gedung Sate (Sate Building) in Bandung, Indonesia. It is a tall, white, modern building with a unique design featuring a large, horizontal, bridge-like structure connecting two main vertical sections. The building is surrounded by greenery and a paved plaza. In the foreground, there is a large, dark, rectangular stone pedestal with a large, irregularly shaped, dark stone resting on top of it. The sky is clear and blue.

LKIP

2021

***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KOTA BANDUNG***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (Bakesbangpol), dapat menyelesaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2021.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya, dan kami sangat menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG



Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196710051989031008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR1

DAFTAR ISI2

BAB I PENDAHULUAN1

 I.1 Latar Belakang1

 I.2 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik2

 I.3 Isu Strategis 10

 I.4 Landasan Hukum 16

 I.5 Sistematika..... 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 19

 II.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu 19

 II.2 Rencana Strategis 19

 II.3 Indikator Kinerja Utama 21

 II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021..... 22

 II.5 Perencanaan Strategis Hasil Reviu 23

 II.6 Rencana Strategis Hasil Reviu 23

 II.7 Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu 24

 II.8 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu..... 26

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA 27

 III.1 Kerangka Pengukuran Kinerja..... 27

 III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama..... 29

 III.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 30

BAB IV PENUTUP 45

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

I.2 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung

A. Kepala Badan

Tugas :

Membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Badan**Tugas :**

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.

.Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Badan;
- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Badan;
- c. Pengoordinasian tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
- d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
- e. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**Tugas :**

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Sub Bagian Program Keuangan

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup keuangan

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan; pelaksanaan administrasi lingkup keuangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. ;

E. Sub Bagian Program, Data dan Informasi

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup program, data dan informasi.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup program, data dan informasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup program, data dan informasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program, data dan informasi;
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup program, data dan informasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, dan karakter bangsa.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;

- c. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa lingkup ideologi dan wawasan kebangsaan

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

H. Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa lingkup bela negara dan karakter bangsa.

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup bela negara dan karakter bangsa;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup bela negara dan karakter bangsa;
- c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup bela negara dan karakter bangsa;

- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup bela negara dan karakter bangsa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

I. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Politik dalam negeri meliputi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi, serta fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup politik dalam negeri;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup politik dalam negeri;
- c. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup politik dalam negeri;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup politik dalam negeri; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

J. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri lingkup pendidikan politik dan peningkatan demokrasi

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
- c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup pendidikan politik dan peningkatan demokrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

K. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri lingkup fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

L. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan**Tugas :**

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- c. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

M. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

N. Kepala Sub Bidang Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan**Tugas :**

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan lingkup organisasi kemasyarakatan

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup organisasi kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup organisasi kemasyarakatan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup organisasi kemasyarakatan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup organisasi kemasyarakatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

O. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**Tugas :**

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik meliputi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

P. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen**Tugas :**

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik lingkup kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen.

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kewaspadaan dini dan kerjasamain telijen;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Q. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik**Tugas :**

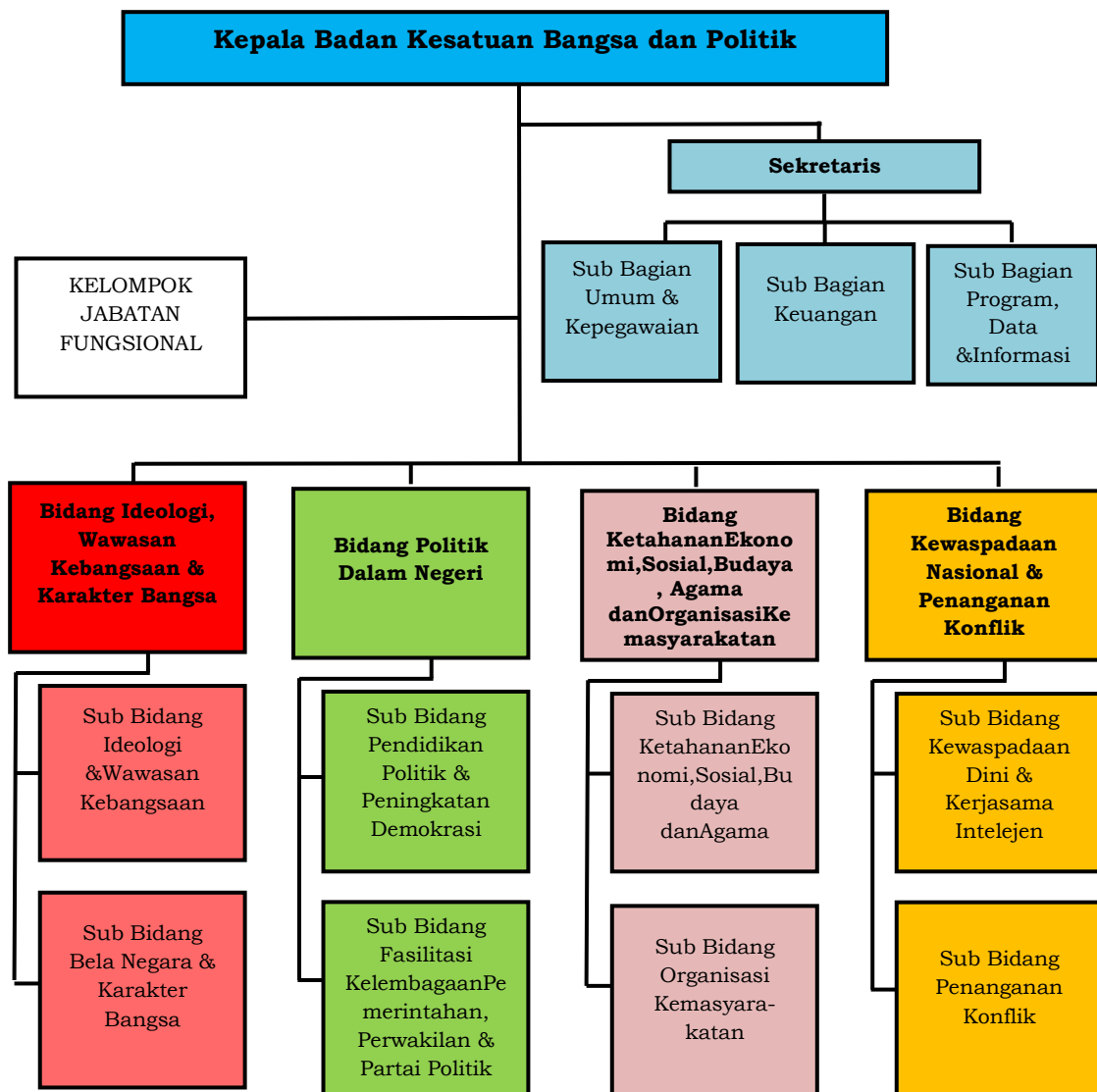
Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik lingkup penanganan konflik.

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup penanganan konflik;

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penanganan konflik;
- c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penanganan konflik;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup penanganan konflik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI



I.3 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapadokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, sertahal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah,maka dapat ditetapkan isu strategis Badan Kesbangpol Kota Bandung yaitu:

- a. Kualitas kesatuan bangsa dan nasionalisme

- b. Penanganan potensi konflik
- c. Mengoptimalkan koordinasi upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
- d. Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan
- e. Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (BARU)
- f. Kualitas demokrasi (BARU)
- g. Mengoptimalkan pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing antar Instansi Pemerintah

1.) **Kualitas kesatuan bangsa dan nasionalisme**

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia kurang bergema di era sekarang. Nilai-nilai kebaikan yang dibawa dalam Pancasila sudah semakin pudar dan berkembang nilai-nilai lain yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Untuk itu perlu ditanamkan kembali atau dikembalikan lagi nilai-nilai Pancasila dalam pikiran, jiwa dan perilaku sosial budaya masyarakat.

Kecintaan dan kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia dikhawatirkan memudar, bahkan rasa nasionalisme dikhawatirkan lenyap seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi lingkungan strategis kita baik internal dan eksternal perkembangannya semakin cepat dan kompleks (*dynamic complexity*) yang mempengaruhi kualitas kesatuan bangsa.

Pengaruh globalisasi akibat kemajuan dalam bidang telekomunikasi, transportasi dan media cetak maupun elektronik, telah merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia sehingga wawasan kebangsaan masyarakat dapat menurun. Kondisi demikian, tidak hanya mempengaruhi kultur budaya bangsa, namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat.

Melemahnya rasa nasionalisme dalam warga negara Indonesia, ditunjukkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016, bahwa 18 dari 100 orang Indonesia tidak tahu judul lagu kebangsaan. Selain itu, 24 dari 100 orang di Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila, serta 53 persen orang Indonesia tidak hafal lirik lagu kebangsaan.

Melemahnya orientasi pemuda Indonesia akan pemahaman mengenai Pancasila dan kebangsaan berpotensi melahirkan gerakan-gerakan radikalisme. Data publikasi hasil metode jejak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2015, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.6

Lemahnya Orientasi Pemuda Indonesia

Dimensi Peran	Indikator (Lemah)	Nilai/Skor
1. Melakukan hal bermanfaat bagi masyarakat	Tidak bermanfaat	41,5
2. Kepedulian terhadap persoalan bangsa	Makin lemah	61,5
3. Kiprah dalam pengamalan Pancasila	Tidak memadai	67,3
4. Kiprah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa	Tidak memadai	56,7
5. Hal yang paling mengkhawatirkan	Narkoba	26,8
	Pergaulan bebas	17,9
	Menurunnya moralitas	11,5

Sumber: Litbang Kompas, 2015 (data yang diolah)

Pemahaman wawasan kebangsaan terutama pada generasi muda sangatlah penting. Pemuda sebagai generasi penerus yang memiliki karakter bangsa di dalam menjalankan kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperkuat wawasan kebangsaan yang tinggi. Pemuda juga sebagai bagian dari bonus demografi yang dimiliki Indonesia, memiliki peran sangat penting dan strategis dalam mendukung kemajuan suatu bangsa.

2.) Penanganan potensi konflik

Permasalahan sosial dan ketenagakerjaan menjadi salah satu pemicu potensikonflik. Tercatat beberapa perkiraan ancaman di daerah yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7

Konflik yang terjadi maupun Potensi Konflik dalam Masyarakat

No.	Potensi Ancaman yang Menimbulkan Konflik	Keterangan
1.	Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak menjadi salah satu perkiraan ancaman yang terjadi di masyarakat	Pemilu dan pilkada serentak dianggap rawan karena dapat memicu konflik internal maupun antar golongan masyarakat dan partai politik
2.	Konflik antara Sunni dan Syiah pun masuk dalam perkiraan ancaman di daerah.	Konflik ini dinilai bisa berkembang kepada dukungan di masyarakat hingga keberangkatan kelompok Islam garis keras yang nantinya

No.	Potensi Ancaman yang Menimbulkan Konflik	Keterangan
		bergabung dengan ISIS.
3.	Kontroversi pembangunan rumah ibadah yang memicu bentrokan antar pihak di daerah	Persoalan pembangunan rumah ibadah yang tidak memiliki izin sering menjadi penyebab bentrokan di sebagian wilayah di Jawa Barat.
4.	Usaha pendirian negara Islam Indonesia oleh sebagian kalangan yang memicu terjadinya gerakan terorisme, radikalisme hingga separatisme.	Masih terdapat sebagian kelompok di Jawa Barat yang menghendaki pembentukan negara Islam sehingga mereka melakukan upaya-upaya ekstrim dan radikal.
5.	Aksi dari kelompok-kelompok oposan, seperti pergerakan buruh, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan lain.	Konflik yang sering terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang biasanya di dahului dengan aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis di tempat-tempat umum.
6.	Bentrok antar warga di wilayah	Sengketa yang sering terjadi biasanya perebutan lahan dan sengketa Sumber Daya Alam

Sumber : Data diolah BIN Provinsi Jawa Barat, (data diolah, detik net, 2017)

Mencermati tabel di atas, bahwasemua potensi ancaman yang menimbulkan konflik dapat terjadi di Kota Bandung. Oleh sebab itu potensi konflik yang akan terjadi harus selalu dideteksi secara dini, sehingga tidak menjadi konflik yang lebih luas.

3.) Mengoptimalkan koordinasi upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian LIPI tahun 2019, sebanyak 240 dari 10.000 orang penduduk Indonesia yang berumur 15-64 tahun pernah memakai narkoba. Selain itu, 180 dari 10.000 orang yang berumur 15-64 tahun memakai narkoba selama satu tahun terakhir. Pengguna narkoba terbanyak berada pada usia produktif yaitu 35 - 44 tahun dan usia pertama kali pakai narkoba 17-19 tahun.

Di Kota Bandung, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba berdasarkan penelitian BNN Kota Bandung dan STKS Bandung Tahun 2015 adalah 1,49% dari jumlah populasi 1.732.748 orang, untuk kelompok usia 17 Tahun ke atas. Data ini bisa lebih besar dari yang tertulis, karena kasus narkoba ibarat fenomena gunung es, hanya terlihat di permukaan saja

Koordinasi antar sektor yang solid menjadi faktor penguat dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah narkoba di daerah. Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral, masing-masing instansi dinilai masih berjalan sendiri-sendiri dan masih berpegang pada ego sektoral masing-masing. Belum adanya MoU antar sektor terkadang menjadi penghambat dalam pelaksanaan P4GN. Masih dibutuhkan kejelasan tugas di antara masing-masing sektor terkait P4GN. Beberapa kasus muncul karena ketidakjelasan tugas dan alokasi dana. Masalah ini tentu akan memengaruhi kinerja dan hubungan kerja antar sektor terkait.

Fakta lain bahwa tidak semua pemangku kepentingan mempunyai pemahaman yang sama terhadap penanganan narkoba, khususnya penanganan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Instansi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan BNN di daerah, memiliki persepsi yang berbeda-beda, terutama terkait permasalahan kepemilikan (Pasal 112) yang sering berbenturan dengan Pasal 127 terkait dengan rehabilitasi.

4.) Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan

Pada umumnya kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Jawa Barat, dipicu masalah perizinan pembangunan rumah ibadat. Hal ini berarti, ada persoalan regulasi yang perlu dibenahi oleh pemerintah agar interaksi antar umat beragama tidak mengarah pada munculnya penilaian negatif ketika ada rencana pembangunan rumah ibadat agama lain di lingkungan permukiman. Isu agama masih menjadi faktor kuat untuk memicu sentimen berbasis identitas *in-group* dan *out-group*, sehingga rentan memicu konflik.

Kurangnya pemahaman terkait prosedur pendirian rumah ibadat sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 kepada aparat pemerintah daerah sampai ke kepala desa/lurah, pihak keamanan, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan masyarakat luas termasuk panitia pembangunan rumah ibadat. Sehingga, koordinasi antar kementerian agama, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat sendiri dinilai belum optimal, kurang aktif dan kurang cepat merespon munculnya persoalan akibat pendirian rumah ibadat.

Dari sepuluh kota dengan nilai toleransi terendah (intoleransi) yang disusun Setara Institute 2015, enam diantaranya berada di wilayah Jawa Barat. Kota dengan intoleransi tertinggi di Indonesia adalah Bogor dengan skor 5,21. Selanjutnya Bekasi di urutan kedua dengan nilai 4,68. Banda Aceh dan Tangerang di posisi tiga dan empat masing-masing dengan nilai 4,58 dan 4,26.

Kota lain di Jawa Barat yang dinilai tidak toleran adalah Depok, Bandung, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Laporan disusun berdasarkan penilaian terhadap praktik toleransi berbagai kota di Indonesia. Pengukuran didasarkan pada enam indikator yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), peraturan daerah diskriminatif, pernyataan pemerintah, dan respon pemerintah atas peristiwa. Riset ini juga melihat peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan komposisi penduduk berdasarkan agama sebagai indikator.

Pada kondisi ini, pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi yang kondusif, seperti melalui penguatan FKUB dan pendidikan multikultural. Pemerintah juga diharapkan lebih tegas, konsisten, dan adil terhadap semua pemeluk agama dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan perizinan pembangunan rumah ibadat dan penerapan peraturan-peraturan tersebut.

5.) Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara dini, terus menerus, terpadu dan sinergis.

Perilaku masyarakat yang konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis (bersifat mengutamakan segi kepraktisan). Pada kondisi normal, tanpa pandemic perilaku masyarakat sudah mulai pragmatis, contoh sederhana saat pilkada calon pemilih akan memilih calon kepala daerah yang siap memberi uang. Hal ini tentu saja melemahkan ketangguhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Bencana non alam yang mulaiterjadi di awaltahun 2020 berupa pandemi melemahkan berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia termasuk di Kota Bandung. Pandemi berdampak pada melemahnya ketahanan ekonomi juga sosial dan budaya. Sebelum pandemic masyarakat sudah mulai bersikap pragmatis apalagi di masa pandemi.

6.) Kualitas demokrasi

Menurut SBY, indikasi terkuat dari demokrasi yang berkualitas adalah semakin tumbuhnya kepercayaan dan optimis masyarakat terhadap system demokrasi dan terhadap para pemimpinnya. Di era sekarang nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, terlepas dari etika berdemokrasi. Praktek demokrasi di Indonesia umumnya dan Kota Bandung khususnya ditandai politik uang yang merajalela, kebebasan berdemonstrasi terlepas dari substansi penting yang diusung, tersebarnya ujaran kebencian dan berita bohong, dsb. Selain itu para pemimpin banyak yang asal berpendapat tidak mencerminkan kehati-hatian, senang berdebat dan kadang kehilangan makna, korupsi tersebar di seluruh penjuru negeri, dsb.

Jika demokrasi yang berkualitas bias dicapai, maka akan menjadikan demokrasi lebih dari sekedar proses penghitungan suara atau transaksi politik. Melainkan suatu kekuatan sejarah riil yang akan membuat masyarakat (bangsa) menjadi kuat, jaya dan makmur.

7.) Mengoptimalkan pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing antar Instansi Pemerintah

Kondisi dalam negeri tiap negara sangat beragam, ada yang tenang ada juga yang penuh gejolak. Begitu pula hubungan satu negara dengan negara tetangganya sangat bervariasi, ada yang rukun ada juga yang penuh konflik. Hal ini menjadi salah satu factor pendorong migrasi.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong dunia yang menyatu dalam bingkai globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Aspek dasar globalisasi yaitu perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, migrasi dan perpindahan manusia serta pembebasan ilmu pengetahuan.

Globalisasi telah menjadikan dunia “menyatu”, jadi bukan hanya arus informasi tetapi arus barang dan modal bahkan manusia dari satu negara ke negara yang lain terus berlanjut. Kasus pengungsi Rohingya merupakan salah satu ilustrasi bagaimana manusia melakukan migrasi, belum lagi serbuan tenaga kerja dari RRC. Belum lagi kasus spionase antar negara menjadi bukti bahwa pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing menjadi penting di era globalisasi ini. Oleh sebab itu optimalisasi pemantauan yang dilakukan antar instansi pemerintah menjadi urgen.

I.4 Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018– 2023;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

I.5 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

II.1 Perencanaan Strategis Sebelum

Reviu

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



II.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun. Didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah :

**TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL,
NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS**

Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdayasaing
- b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2019-2023 sebanyak DUA sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83.25	83.50	87.00	87.25

II.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	Untuk kelancaran berjalannya roda pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat	Jumlah kejadian berpotensi konflik yang diselesaikan berbanding Jumlah kejadian berpotensi konflik	Kejadian Yang berpotensi konflik berkepanjangan
2	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Untuk kelancaran berjalannya roda pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat	Quisioner	

II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021,

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung
Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	100
2	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.50

II.5 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2021, sebagai berikut :

II.6 Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2021

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2021 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83	83.25	83.50	87.00	87.25

II.7 Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	Untuk kelancaran berjalannya roda pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat	Jumlah kejadian berpotensi konflik yang diselesaikan berbanding Jumlah kejadian berpotensi konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung	Kejadian Yang berpotensi konflik berkepanjangan
2	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Untuk kelancaran berjalannya roda pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat	Quisioner	Survei	.

II.8 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	100
2	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83.50

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi



kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

III.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Bandung Tahun 2021**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2021.

III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung
Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	100	100	100.00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83.50	87.89	105.26

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 105.26%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik, dengan capaian kinerja 100 %.

III.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	100	100	100.00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83.50	87.89	105.26

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	50.00 %
2	Sesuai Target	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	0	0	1	100.00	0	0.00
2	Misi 2	1	1	100.00	0	0	0	0.00
	Jumlah	2	1	100.00	1	100	0	0.00

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00%
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00%
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam PerubahanRenstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya PembinaanKerukunanaspekIdeologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	100	100	100.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun ke-4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik" tahun ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

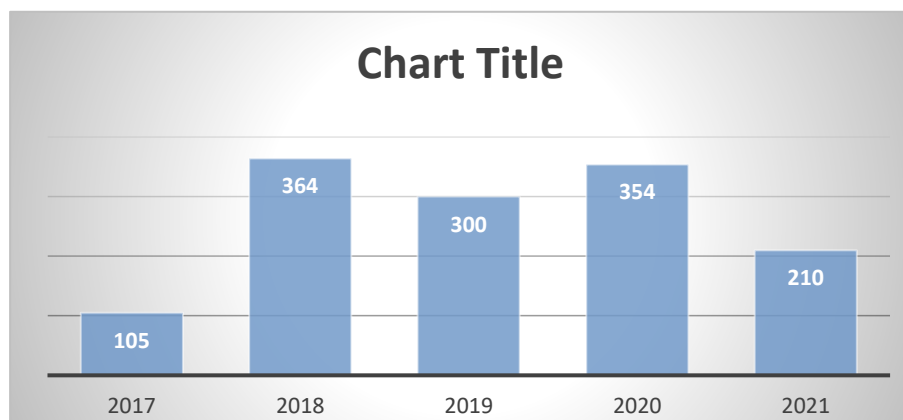
Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, Realisasi Tahun 2021 adalah 100% sesuai dengan yang direncanakan 100%

Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, Realisasi Tahun 2021 sama dengan realisasi tahun 2020, dimana 2020 ada 354 kejadian dan dapat diselesaikan seluruhnya begitu pula tahun 2021 ada 210 kejadian dan bisa diselesaikan seluruhnya

Tabel 3.7

Angka Kejadian Berpotensi Konflik

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	10	23	31	25	7
2	Februari	4	24	13	21	11
3	Maret	8	11	21	27	10
4	April	4	51	23	24	14
5	Mei	12	31	33	10	16
6	Juni	4	10	15	30	15
7	Juli	7	36	23	47	11
8	Agustus	17	38	30	47	21
9	September	8	31	33	41	25
10	Oktober	12	40	31	44	26
11	November	12	37	22	25	28
12	Desember	7	32	25	13	26
Jumlah		105	364	300	354	210



Dari grafik diatas bias dilihat ada penurunan kejadian berpotensi konflik. Dari 354 kejadian menjadi 210 kejadian atau menurun 40,68%

Ada beberapa factor pendukung dalam penurunan jumlah kejadian diantaranya, yaitu :

1. Terdapatnya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah;
2. Koordinasi dengan Instansi yang terkait dengan Substansi Isu;
3. Koordinasi dengan Instansi vertikal (TNI dan POLRI) dan
4. Mengarahkan aksi ke audiensi.

Tabel 3.7
**REKAPITULASI DATA POTENSI KONFLIK DI KOTA BANDUNG
TAHUN 2021**

No	POTENSI KONFLIK	BULAN												JML	KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES		
1	Bidang Agama / Ideologi	0	0	0	1	3	3	0	7	2	1	0	1	18	9%
2	Bidang Ekonomi	3	1	0	1	0	1	6	1	1	0	12	5	31	15%
3	Bidang Sosbud	4	6	9	9	7	6	2	8	17	20	12	16	116	55%
4	Bidang Politik	0	1	0	1	2	3	1	1	0	0	3	3	15	7%
5	Bidang Hankam	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	4	2%
6	Bidang Perselisihan Antar Ormas, LSM atau Instansi Lainnya	0	3	1	2	4	2	0	3	5	4	1	1	26	12%
JUMLAH PER BULAN		7	11	10	14	16	15	11	21	25	26	28	26		
TOTAL JUMLAH														210	100%

Kinerja nyata dengan target akhir renstra, Target Akhir Renstra 100% dan tahun 2021 mencapai 100%. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional Untuk membandingkan dengan kinerja instansi lain Kesbangpol Kota Bandung tidak menemukan pembandingan (*Apple to apple*). Namun, sasaran Kinerja Kesbangpol menjadi salah satu pendukung terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat dan menggambarkan tingkat toleransi. IDI Jawa Barat tahun 2020 adalah 71,32. Menurut Survei Star Institute Tahun 2020 Bandung Ranking 6 Kota dengan Skor Tertinggi Indikator 6 (Tindakan Pemerintah: Tindakan Nyata) dengan skor 6 dan Ranking 6 Kota dengan Skor Tertinggi Indikator 7 (Heterogenitas Agama) dengan skor 5,00.



Tabel 3.8

Tingkat Efesiensi dan Efektifitas

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.1	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	100	100	100.00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.765.287.868	1.298.648.400	73.57
								PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.649.593.500	2.608.399.723	98.45
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	524.180.000	497.270.250	94.87
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	577.870.000	505.285.000	87.44
								PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.484.471.000	13.699.812.000	94.58
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			100.00
		TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 7.80 %									
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 108.46 %											

Sasaran pertama didukung dengan 5 (lima) program meliputi aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, dan Hankam (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Supaya setiap potensi konflik tidak menjadi konflik atau untuk menjaga kondusifitas kota Bandung dalam mendukung Bandung yang humanis maka perlu pembinaan ideologi dan Politik melalui **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**. Untuk pembinaan ormas dan pemanfaatan data lingkup Ekonomi dan Sosial budaya sebagai bahan kebijakan pimpinan didukung **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**. Program ke-5 adalah **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** untuk monitoring terkait isu Pertahanan dan Keamanan. Dimana capaian kinerja setiap program 100% yang artinya setiap potensi konflik dapat ditindaklanjuti sebagai bahan kebijakan pimpinan.

Sasaran 2

Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat

Analisis Pencapaian Sasaran 2**Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83.25	87.47	105.07	83.5	87.89	105.26

Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar 87.89 dari target sebesar 83.50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105.26 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini meningkat 0,19 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 105.07

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 105.26 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 104.13 %.

Berikut tabel IKM kota Bandung



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2021

NO	NAMA PD / UNIT KERJA	HASIL PENILAIAN TAHUN 2021									
		SEMESTER I					SEMESTER II				
		JUMLAH RSPONDEN	NILAI INDEKS	IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	JUMLAH RSPONDEN	NILAI INDEKS	IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	Sekretariat Daerah	108	3,493	87,325	B	Baik	577	3,625	90,625	A	Sangat Baik
2	Dinas Komunikasi dan Informasi	87	3,520	88,000	B	Baik	19	3,386	84,650	B	Baik
3	Dinas perdagangan dan Perindustrian	58	3,362	84,050	B	Baik	205	3,396	84,900	B	Baik
4	Dinas perumahan dan Kawasan Pemukiman, pertahanan dan pertamaan	51	3,414	85,350	B	Baik	85	3,416	85,400	B	Baik
5	Dinas Pengendalianpenduduk dan KB	244	3,360	84,000	B	Baik	259	3,361	84,025	B	Baik
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	289	3,673	91,825	A	Sangat Baik	709	3,674	91,850	A	Sangat Baik
7	Satuan Polisi PamangPraja	50	3,462	86,550	B	Baik	150	3,404	85,100	B	Baik
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	147	3,330	83,250	B	Baik	148	3,341	83,525	B	Baik
9	Dinas Pangan dan Pertanian	175	3,565	89,125	A	Sangat Baik	100	3,471	86,775	B	Baik
10	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	292	3,498	87,450	B	Baik	303	3,486	87,150	B	Baik
11	Dinas Kebakaran dan PenanggulanganBencana	89	3,367	84,175	B	Baik	62	3,380	84,500	B	Baik
12	Dinas PekerjaanUmum	30	3,619	90,475	A	Sangat Baik	39	3,439	85,975	B	Baik
13	Dinas Penataan Ruang	693	3,415	85,375	B	Baik	576	3,405	85,125	B	Baik



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2021

NO	NAMA PD / UNIT KERJA	HASIL PENILAIAN TAHUN 2021									
		SEMESTER I					SEMESTER II				
		JUMLAH RSPONDEN	NILAI INDEKS	IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	JUMLAH RSPONDEN	NILAI INDEKS	IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	123	3,634	90,850	A	Sangat Baik	32	3,635	90,875	A	Sangat Baik
15	Dinas Perhubungan	100	3,518	87,950	B	Baik	300	3,331	83,275	B	Baik
16	Dinas Tenaga Kerja	56	3,458	86,450	B	Baik	158	3,488	87,200	B	Baik
17	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	150	3,456	86,400	B	Baik	150	3,461	86,525	B	Baik
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40	3,550	88,750	A	Sangat Baik	93	3,375	84,375	B	Baik
19	Dinas Kesehatan	30	3,385	84,625	B	Baik	30	3,433	85,825	B	Baik
20	Dinas Pendidikan	99	3,431	85,775	B	Baik	125	3,403	85,075	B	Baik
21	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	32	3,611	90,275	A	Sangat Baik	621	3,445	86,125	B	Baik
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	50	3,411	85,275	B	Baik	197	3,448	86,200	B	Baik
23	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan	63	3,437	85,925	B	Baik	200	3,404	85,100	B	Baik
24	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	309	3,794	94,850	A	Sangat Baik	1002	3,882	97,050	A	Sangat Baik



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2021

NO	NAMA PD / UNIT KERJA	HASIL PENILAIAN TAHUN 2021									
		SEMESTER I					SEMESTER II				
		JUMLAH RSPONDEN	NILAI INDEKS	IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	JUMLAH RSPONDEN	NILAI INDEKS	IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	116	3,433	85,825	B	Baik	105	3,467	86,675	B	Baik
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	226	3,472	86,800	B	Baik	587	3,485	87,125	B	Baik
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	56	3,415	85,375	B	Baik	69	3,417	85,425	B	Baik
28	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	41	3,675	91,875	A	Sangat Baik	43	3,550	88,750	A	Sangat Baik
29	Kecamatan Cidap	60	3,369	84,225	B	Baik	60	3,398	84,950	B	Baik
30	Kecamatan Gedebage	40	3,781	94,525	A	Sangat Baik	10	3,711	92,775	A	Sangat Baik
31	Kecamatan Cinambo	300	3,340	83,500	B	Baik	300	3,370	84,250	B	Baik
32	Kecamatan Bandung Kidul	234	3,547	88,675	A	Sangat Baik	79	3,321	83,025	B	Baik
33	Kecamatan Buah Batu	150	3,412	85,300	B	Baik	150	3,404	85,100	B	Baik
34	Kecamatan Rancasari	60	3,531	88,275	B	Baik	27	3,572	89,300	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Panyileukan	150	3,569	89,225	A	Sangat Baik	300	3,538	88,450	A	Sangat Baik
36	Kecamatan Cibiru	169	3,385	84,625	B	Baik	169	3,383	84,575	B	Baik
37	Kecamatan Ujung Berung	150	3,444	86,100	B	Baik	150	3,445	86,125	B	Baik
38	Kecamatan Arcamanik	150	3,356	83,900	B	Baik	150	3,358	83,950	B	Baik
39	Kecamatan Mandalajati	212	3,338	83,450	B	Baik	183	3,397	84,925	B	Baik



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2021

NO	NAMA PD / UNIT KERJA	HASIL PENILAIAN TAHUN 2021									
		SEMESTER I					SEMESTER II				
		JUMLAH RSPONDEN	NILAI INDEKS	IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	JUMLAH RSPONDEN	NILAI INDEKS	IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
40	KecamatanAntapani	31	3,362	84,050	B	Baik	105	3,441	86,025	B	Baik
41	Kecamatan Bandung Kulon	155	3,380	84,500	B	Baik	150	3,360	84,000	B	Baik
42	KecamatanBabakanCiparay	196	3,824	95,600	A	Sangat Baik	110	3,882	97,050	A	Sangat Baik
43	KecamatanSukaSari	60	3,683	92,075	A	Sangat Baik	150	3,741	93,525	A	Sangat Baik
44	KecamatanSukajadi	165	3,345	83,625	B	Baik	184	3,345	83,625	B	Baik
45	KecamatanCicendo	152	3,434	85,850	B	Baik	169	3,439	85,975	B	Baik
46	KecamatanAndir	32	3,514	87,850	B	Baik	25	3,524	88,100	B	Baik
47	KecamatanCoblong	112	3,918	97,950	A	Sangat Baik	65	3,855	96,375	A	Sangat Baik
48	Kecamatan Bandung Wetan	40	3,239	80,975	B	Baik	45	3,346	83,650	B	Baik
49	KecamatanSumur Bandung	31	3,358	83,950	B	Baik	60	3,363	84,075	B	Baik
50	KecamatanCibeunyingKaler	119	3,433	85,825	B	Baik	257	3,534	88,350	A	Sangat Baik
51	KecamatanCibeunyingKidul	62	3,380	84,500	B	Baik	62	3,387	84,675	B	Baik
52	KecamatanKiaraCondong	101	3,347	83,675	B	Baik	93	3,472	86,800	B	Baik
53	KecamatanBatununggal	31	3,581	89,525	A	Sangat Baik	21	3,614	90,350	A	Sangat Baik
54	KecamatanLengkong	70	3,322	83,050	B	Baik	70	3,402	85,050	B	Baik
55	KecamatanRegol	60	3,394	84,850	B	Baik	57	3,390	84,750	B	Baik
56	KecamatanAstanaanyar	92	3,536	88,400	A	Sangat Baik	50	3,371	84,275	B	Baik
57	KecamatanBojongloaKaler	153	3,409	85,225	B	Baik	224	3,438	85,950	B	Baik



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2021

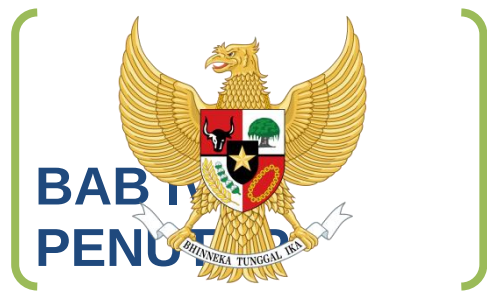
NO	NAMA PD / UNIT KERJA	HASIL PENILAIAN TAHUN 2021									
		SEMESTER I					SEMESTER II				
		JUMLAH RSPONDEN	NILAI INDEKS	IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	JUMLAH RSPONDEN	NILAI INDEKS	IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
58	KecamatanBojongloaKidul	150	3,376	84,400	B	Baik	150	3,393	84,825	B	Baik
59	Inspektarat Kota Bandung	114	3,430	85,750	B	Baik	74	3,452	86,300	B	Baik
60	Sekretariat DPRD Kota Bandung	50	3,482	87,050	B	Baik	32	3,649	91,225	A	Sangat Baik
61	Kota Bandung	7455	3,476	86,900	B	Baik	10775	3,472	86,800	B	Baik

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
2	MeningkatnyaTertibAdministrasi dan PelayananKepada Masyarakat	2.1	IndeksKepuasan Masyarakat	%	83.50	87.89	105.26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.415.731.072	10.181.961.827	82.01
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					105.26	TOTAL PER SASARAN	12.415.731.072	10.769.328.274	86.74
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 23.25 %											
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 128.35 %											



Sasaran kedua didukung oleh satu program (ADUM), karena bersifat administrative tidak teknis. Serapan anggran program 82.01% ini disebabkan ada silva dari kompone belanja perawatan, diaman standar harga dan harag real di lapangan jauh. Standar harga pada sitem lebih tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance)



Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 105.26 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 32.417.133.440 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 29.378.743.647, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dengancapaian sangat baik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung 2018-2023 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan

tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 105.26 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 29.378.743.647 (duapuluhsembilanmilyartiga ratus tujuhpuhdelapanjutatujuh ratus empatpuluhtigaribuenam ratus empatpuluhtujuh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2021 adalah 90.63 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung termasuk optimal namun perlu lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Harapan Bakesbangpol Kota Bandung untuk tahun yang akan datang membutuhkan dukungan untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu. Terutama dalam dukungan penambahan Sumber Daya Manusia untuk di lapangan dan tenaga IT. Untuk meningkatkan pelayanan, dalam hal ini pemberian Rekomendasi terkait yang mau praktek kerja/survey di lingkungan pemerintah Kota Bandung perlu diperbaiki bangun kantor supaya lebih nyaman untuk pemohon rekomendasi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG

Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196710051989031008